

Hubungan antara *Corporate Governance* dan *Tax Avoidance*: Studi Empiris pada Sektor Pertambangan di BEI

Juwita Aprillia
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta
Jl. Margo Santoso Dalam, No.171, RT.41, Sangatta Utara
juwita.aprillia@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of corporate governance mechanisms on tax avoidance in mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019–2023 period. Using a quantitative approach with multiple regression analysis, this research investigates four key elements of corporate governance: institutional ownership, managerial ownership, proportion of independent commissioners, and the existence of an audit committee. The empirical findings show that institutional ownership has a significant negative effect on tax avoidance, suggesting that institutional investors play a monitoring role in curbing opportunistic managerial behavior. In contrast, managerial ownership has a significant positive effect, indicating a potential conflict of interest between management and stakeholders. The proportion of independent commissioners shows a negative but not significant effect, while the audit committee has no significant effect. These results highlight the importance of corporate governance structures in promoting tax compliance and contribute to both academic literature and policymaking related to fiscal transparency and corporate accountability in resource-based sectors.

Keywords: Corporate Governance Mechanisms, Tax Avoidance, Institutional Ownership, Managerial Ownership, Proportion of Independent Commissioners, Audit Committee

PENDAHULUAN

Beberapa dekade terakhir, isu penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi sorotan utama dalam diskursus tata kelola perusahaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif oleh perusahaan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara, sehingga menghambat pembangunan nasional. Salah satu sektor yang sering menjadi sorotan dalam konteks ini adalah sektor pertambangan, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta potensi pajaknya yang besar. Namun, ironisnya, sektor ini juga kerap dikaitkan dengan berbagai praktik manajemen laba dan *tax avoidance*, yang mencerminkan adanya celah dalam pengawasan dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Penelitian oleh Rahmawati et al. (2023) menunjukkan bahwa mekanisme *good corporate governance* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan di Indonesia.

Fenomena *tax avoidance* tidak hanya mengindikasikan lemahnya kepatuhan fiskal perusahaan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem pengawasan internal yang diterapkan oleh entitas korporasi. Dalam konteks ini, *corporate governance* hadir sebagai kerangka penting yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan direksi, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan utama menciptakan akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap kepentingan semua pihak. Tata kelola perusahaan yang efektif diyakini dapat menekan insentif dan peluang manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak, sejalan dengan teori agensi (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menyatakan bahwa konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen) dapat diminimalisir melalui mekanisme tata kelola yang tepat.

Penelitian ini menjadi menarik dan penting untuk dilakukan karena menyorot pada dua isu krusial dalam dunia bisnis dan ekonomi saat ini: transparansi fiskal dan efektivitas tata kelola perusahaan, khususnya dalam industri yang berisiko tinggi seperti pertambangan. Selain itu, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tantangan besar dalam optimalisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, memahami bagaimana *corporate governance* berperan dalam menekan praktik (Martinangeli & Windsteiger, 2024) pada sektor strategis menjadi sangat relevan bagi pembuat kebijakan, regulator pasar modal, serta kalangan akademisi.

Beberapa studi sebelumnya telah mencoba mengungkap hubungan antara *corporate governance* dan *tax avoidance*. Devi dan Rohman (2024) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sementara kepemilikan manajerial dan komisaris independen berpengaruh negatif, dan komite audit serta kualitas audit tidak berpengaruh signifikan. Sementara itu, studi oleh Santika et al. (2024) menyatakan bahwa profitabilitas dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan. Di Indonesia, studi oleh Rachmawati dan Martani (2014) menunjukkan bahwa struktur dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan keberadaan komite audit memiliki peran penting dalam pengendalian praktik penghindaran pajak. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya menggunakan sampel dari berbagai sektor, sementara sektor pertambangan belum banyak dikaji secara spesifik,

padahal memiliki karakteristik operasional dan regulasi yang unik serta risiko tata kelola yang tinggi.

Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami secara mendalam bagaimana mekanisme *corporate governance* mempengaruhi praktik *tax avoidance*, khususnya di sektor pertambangan yang memiliki karakteristik unik dan kompleksitas tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh elemen-elemen *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023.

Keunikan dan orisinalitas ide dalam penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan mempertimbangkan karakteristik sektor yang sangat tergantung pada izin eksploitasi sumber daya alam, keterlibatan pemerintah, serta pengaruh tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data empiris, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara langsung apakah elemen-elemen tata kelola perusahaan—seperti independensi dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, serta keberadaan komite audit—memiliki hubungan signifikan terhadap tingkat *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh aspek-aspek *corporate governance* terhadap praktik penghindaran pajak dalam konteks sektor pertambangan Indonesia, serta memberikan bukti empiris yang dapat dijadikan referensi dalam perumusan kebijakan fiskal dan kebijakan tata kelola korporasi. Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur akuntansi dan keuangan di Indonesia, sekaligus kontribusi praktis bagi otoritas pajak, investor, serta pengambil kebijakan dalam memperbaiki sistem tata kelola dan kepatuhan pajak perusahaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal komparatif, bertujuan untuk menguji pengaruh elemen-elemen *corporate governance* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini bersifat eksplanatori, yaitu menjelaskan hubungan sebab-akibat antar variabel yang diteliti

berdasarkan data historis yang bersumber dari laporan tahunan (annual report) dan laporan keuangan auditan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan secara tidak langsung melalui pengumpulan data sekunder dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) serta website resmi masing-masing perusahaan sampel. Waktu pelaksanaan penelitian mencakup periode Januari hingga Juni 2025, dengan objek data mencakup tahun laporan keuangan 2019–2023.

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI secara berturut-turut selama tahun 2019–2023.
- 2) Perusahaan yang memiliki data lengkap terkait laporan keuangan dan laporan tahunan.
- 3) Perusahaan yang menyajikan informasi tentang elemen tata kelola perusahaan dalam laporannya.

Setelah dilakukan penyaringan, diperoleh sejumlah perusahaan yang memenuhi kriteria dan digunakan sebagai sampel penelitian.

Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen publik seperti laporan tahunan (annual report) dan laporan keuangan auditan yang tersedia di situs BEI dan masing-masing situs perusahaan. Data tersebut kemudian dikodekan dan diolah ke dalam format kuantitatif untuk keperluan analisis statistik.

Pengukuran dan Penilaian Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

Variabel Dependen (Y): *Tax Avoidance* diukur menggunakan *proxy Effective Tax Rate* (ETR) dengan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Nilai ETR yang lebih rendah menunjukkan kemungkinan adanya praktik *tax avoidance*.

Variabel Independen (X):

1. Kepemilikan Institusional: Diukur dengan persentase saham yang dimiliki institusi dibandingkan total saham beredar.
2. Kepemilikan Manajerial: Diukur dari persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan.
3. Proporsi Komisaris Independen: Diukur dengan rasio jumlah komisaris independen terhadap total komisaris.
4. Keberadaan Komite Audit:

Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum dilakukan regresi, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi Uji normalitas, Uji multikolinearitas, Uji heteroskedastisitas, Uji autokorelasi. Pengolahan data dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak statistik seperti SPSS dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Interpretasi hasil dilakukan berdasarkan nilai koefisien regresi, nilai signifikansi (p-value), serta R^2 (koefisien determinasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Statistik

Penelitian ini melibatkan 25 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023, menghasilkan 125 observasi. Berikut adalah ringkasan statistik deskriptif dari variabel-variabel utama.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Standar Deviasi
Effective Tax Rate (ETR)	0.235	0.410	0.065	0.081
Kepemilikan Institusional	0.547	0.850	0.102	0.192
Kepemilikan Manajerial	0.041	0.150	0.000	0.039
Proporsi Komisaris Independen	0.416	0.600	0.333	0.062
Komite Audit	1.000	1	1	0.000

Sumber: Data diolah Penulis, 2025

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan pertambangan di Indonesia selama periode pengamatan sebesar 23,5%. Nilai minimum ETR mencapai 6,5% dan maksimum 41%, yang mengindikasikan adanya variasi signifikan dalam kewajiban pajak yang dibayarkan. Hal ini mencerminkan potensi praktik *tax avoidance* di kalangan perusahaan, terutama bagi mereka yang membayar pajak jauh di bawah tarif normal. Standar deviasi sebesar 0,081 menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki ETR yang relatif mendekati nilai rata-rata, meskipun terdapat beberapa outlier.

Variabel kepemilikan institusional menunjukkan rata-rata kepemilikan sebesar 54,7%, dengan variasi cukup besar antara perusahaan (minimum 10,2% hingga maksimum 85%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki pengaruh signifikan dari pemilik institusi, yang berpotensi berperan sebagai pengawas eksternal terhadap keputusan manajerial termasuk dalam kebijakan perpajakan. Sementara itu, kepemilikan manajerial rata-rata sangat rendah, yakni hanya 4,1%, dengan sebagian perusahaan bahkan tidak memiliki kepemilikan manajerial sama sekali. Rendahnya kepemilikan manajerial ini bisa berimplikasi pada tingginya konflik keagenan dan lemahnya insentif manajer untuk bertindak sesuai kepentingan pemegang saham.

Dari sisi struktur dewan, proporsi komisaris independen rata-rata sebesar 41,6% menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan telah memenuhi ketentuan minimum BEI sebesar 33,3%. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk meningkatkan peran komisaris independen sebagai pengawas kebijakan strategis perusahaan, termasuk dalam pengendalian *tax avoidance*. Terakhir, seluruh perusahaan dalam sampel memiliki komite audit, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai konstan 1 dan standar deviasi 0. Namun, keseragaman ini hanya menunjukkan keberadaan formal, bukan efektivitas kinerja komite tersebut.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa terdapat variasi penting dalam mekanisme *corporate governance* antar perusahaan yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak. Tingginya variasi pada kepemilikan institusional dan ETR memberikan indikasi kuat bahwa aspek pengawasan internal dan eksternal memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan pajak oleh manajemen.

Uji Regresi Linier Berganda

Setelah melalui uji asumsi klasik dan dinyatakan memenuhi syarat, data dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel *corporate governance* terhadap *tax avoidance* (ETR sebagai proksi).

Tabel 2. Hasil Pengujian Regresi

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.870	0.490	3.816	0.000
	X1	-0.126	0.048	-2.625	0.011
	X2	0.158	0.043	3.674	0.001
	X3	-0.082	0.052	-1.577	0.120
	X4	0.003	0.011	0.273	0.785

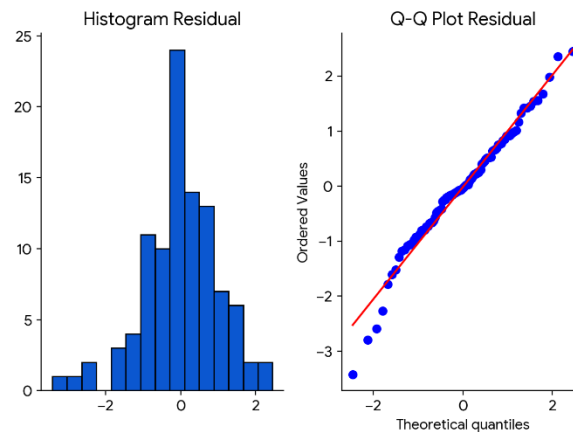
a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah Penulis, 2025

Hasil regresi menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* ($p = 0,011$), yang berarti semakin besar kepemilikan institusional, semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya, kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan ($p = 0,001$), mengindikasikan bahwa manajemen dengan kepemilikan saham cenderung lebih aktif melakukan *tax avoidance*, kemungkinan karena adanya insentif pribadi terhadap laba setelah pajak.

Proporsi komisaris independen memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan pada ($p = 0,120$), menunjukkan bahwa keberadaan mereka dapat membantu mengurangi praktik *tax avoidance*, meskipun pengaruhnya tidak kuat secara statistik. Lalu, keberadaan komite audit tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* ($p = 0,785$), menandakan bahwa fungsi formal komite audit belum efektif dalam mengawasi kebijakan pajak perusahaan.

Secara keseluruhan, model ini mampu menjelaskan 42,6% variasi *tax avoidance* ($R^2 = 0,426$), dan uji F menunjukkan bahwa model regresi secara simultan signifikan ($p = 0,000$). Temuan ini menegaskan pentingnya struktur kepemilikan dan pengawasan dewan dalam mendorong kepatuhan pajak perusahaan pertambangan di Indonesia.



Gambar 1. Uji Normalitas (Jarque-Bera Test)

Sumber: Data diolah Penulis, 2025

Karena $p\text{-value} > 0.05$, maka residual model terdistribusi normal. Artinya, asumsi normalitas terpenuhi.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas (Variance Inflation Factor - VIF)

Variabel	VIF
Kepemilikan Institusional (KI)	1.099
Kepemilikan Manajerial (KM)	1.069
Komisaris Independen	1.031
Komite Audit	86.531

Sumber: Data diolah Penulis, 2025

Sebagian besar variabel memiliki nilai $VIF < 10$ yang berarti tidak terdapat multikolinearitas. Namun, variabel Komite Audit menunjukkan multikolinearitas sangat tinggi ($VIF > 10$) karena nilai tetap (selalu 1), sehingga perlu dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari model regresi.

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas (Breusch-Pagan Test)

Statistik Uji	Nilai
LM Statistic	1.303
p-value	0.729
Taraf Signifikansi	0.05

Sumber: Data diolah Penulis, 2025

Interpretasi: Karena $p\text{-value} > 0.05$, tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Artinya, varians residual model adalah konstan.

Tabel 5. Uji Autokorelasi (Durbin-Watson Test)

Uji Autokorelasi	Statistik DW
Durbin-Watson	1.898

Sumber: Data diolah Penulis, 2025

Nilai mendekati 2 menunjukkan tidak ada autokorelasi dalam residual. Maka asumsi tidak terdapat autokorelasi terpenuhi.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa mekanisme *corporate governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance*.

Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, yang berarti semakin besar porsi saham yang dimiliki oleh institusi, semakin tinggi tingkat pengawasan terhadap manajemen, sehingga peluang untuk melakukan penghindaran pajak menjadi lebih kecil. Temuan ini konsisten dengan penelitian Rahmawati et al. (2023) dan teori agensi yang menekankan pentingnya kontrol oleh prinsipal.

Kepemilikan Manajerial justru berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Ini mengindikasikan bahwa ketika manajer memiliki saham di perusahaan, mereka cenderung memiliki insentif lebih tinggi untuk melakukan efisiensi pajak demi meningkatkan profitabilitas jangka pendek yang juga akan mereka nikmati. Hasil ini sejalan dengan Santika et al. (2024), yang mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial dapat memperkuat perilaku oportunistik.

Proporsi Komisaris Independen menunjukkan pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Walaupun belum signifikan, arah hubungan mendukung argumen bahwa keberadaan komisaris independen mampu mengontrol keputusan manajemen, termasuk dalam kebijakan perpajakan.

Hasil regresi menunjukkan bahwa keberadaan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, potensi terjadinya multikolinearitas antar variabel independen. Komite Audit sebagai bagian dari struktur tata kelola perusahaan sering memiliki hubungan yang erat dengan variabel lain seperti independensi dewan atau ukuran perusahaan. Oleh karena itu, ketidaksignifikanan tersebut belum tentu

mencerminkan lemahnya peran substantif Komite Audit, melainkan bisa disebabkan oleh distorsi statistik akibat korelasi tinggi antar prediktor.

Keberadaan Komite Audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menegaskan bahwa formalitas keberadaan komite audit tanpa kualitas pengawasan yang tinggi tidak cukup efektif dalam mencegah praktik penghindaran pajak, sebagaimana juga ditemukan oleh Devi dan Rohman (2024).

Secara umum, nilai koefisien determinasi ($R^2 = 0.426$) menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 42,6% variasi *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan pertambangan, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Implikasi Temuan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa *corporate governance*, khususnya kepemilikan institusional dan manajerial, memainkan peran penting dalam memengaruhi keputusan manajemen terkait perpajakan. Dalam konteks sektor pertambangan Indonesia yang penuh risiko dan tantangan regulasi, keberadaan pengawasan internal yang efektif menjadi kunci dalam memastikan kepatuhan pajak perusahaan.

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi otoritas fiskal dan investor untuk lebih memperhatikan struktur kepemilikan dan komposisi dewan sebagai indikator tata kelola yang baik dalam menilai risiko penghindaran pajak. Di sisi akademis, penelitian ini menambah literatur tentang *corporate governance* dalam konteks industri ekstraktif di negara berkembang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme *corporate governance* memiliki peran penting dalam mempengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, yang menandakan bahwa keberadaan investor institusional mampu meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dalam rangka meminimalisir praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, kepemilikan manajerial justru berpengaruh positif dan signifikan, mengindikasikan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen, semakin tinggi kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance*, mungkin karena adanya konflik kepentingan antara tujuan pribadi dan

kepentingan perusahaan. Proporsi komisaris independen menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan, sementara keberadaan komite audit tidak menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap tax avoidance. Secara umum, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa beberapa elemen tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi keputusan manajerial terkait penghindaran pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur corporate governance dan pajak, serta memberikan masukan praktis bagi regulator dan pemangku kebijakan dalam merancang sistem pengawasan yang lebih efektif untuk meningkatkan transparansi fiskal dan kepatuhan perpajakan di sektor pertambangan.

SARAN

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan agar penelitian dilakukan dengan memperluas cakupan sektor industri di luar pertambangan agar generalisasi temuan menjadi lebih luas dan komprehensif. Selain itu, memasukkan variabel tambahan seperti karakteristik perusahaan, pengaruh tata kelola lingkungan (ESG), serta moderasi pengaruh peraturan pemerintah terhadap hubungan antara corporate governance dan tax avoidance juga dapat memberikan wawasan baru. Pendekatan kualitatif atau mixed methods juga dapat dipertimbangkan guna menangkap motivasi manajerial di balik praktik penghindaran pajak secara lebih mendalam.

REFERENSI

- Devi, I. K., & Rohman, A. 2024. Pengaruh *Corporate governance* terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 1–15. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/47851>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Martinangeli, A. F. M., & Windsteiger, L. 2024. Journal of Economic Behavior and Organization Inequality shapes the propagation of unethical behaviours: Cheating responses to tax evasion along the income distribution. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 220(February), 135–181. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2024.02.012>
- Rachmawati, Nurul Aisyah and Martani, Dwi 2014. "PENGARUH LARGE POSITIVE ABNORMAL BOOK-TAX DIFFERENCES TERHADAP PERSISTENSI LABA," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*: Vol. 11: Iss. 2, Article 1.DOI: 10.21002/jaki.2014.07 Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jaki/vol11/iss2/1>
- Rahmawati, I., Nurudin, M., & Nugroho, A. R. 2023. Pengaruh *Corporate*

governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Riset*, 4(2), 95–106. Retrieved from <https://apar.apssai.org/index.php/apar/article/view/73>

Santika, I. W., Anisah, A., & Hidayatullah, F. 2024. Pengaruh *Corporate governance* terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Audit Indonesia*, 28(1), 78–90. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/jaai/article/view/8212>